

## “Kaleidoskop” Perekonomian Gorontalo

**T**ANGGAL 5 Desember 2018 hari ini Provinsi Gorontalo telah memasuki usia yang ke 18, pada awal berpisah dari Sulawesi Utara banyak tantangan yang dihadapi oleh daerah ini. Jika dipetakan tantangan pembangunan Provinsi Gorontalo ada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Keduanya saling terkait dan menunjang satu sama lain untuk memajukan percepatan pembangunan. Aspek ekonomi secara makro sederhananya dapat dibaca terkait masalah PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, serta kemampuan fiskal. Sedangkan dilihat dari aspek sosialnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2000 tonggak awal berdirinya Gorontalo tercatat PDRB atas harga konstan baru mencapai Rp. 918.614 miliar, dengan tingkat pendapatan per kapita Rp. 1.060.985 dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89 %. Sektor pertanian menjadi motor penggerak perekonomian, sektor ini berkontribusi sebesar 30,16 % dan sektor jasa-jasa 16,90 % yang didominasi oleh jasa pemerintah. Distribusi perekonomian semacam ini menggambarkan bahwa aktor utama ekonomi Gorontalo adalah rumah tangga petani dan pemerintah, sementara peran swasta apalagi internasional masih sangat lemah. Patut disayangkan, sektor pertanian sekalipun memiliki pangsa yang paling besar namun laju pertumbuhannya terhitung rendah, yaitu 3,37 % kalah jauh dari sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 14,01 % dengan tingkat pangsa yang sangat kecil 0,67 %. Sehingga wajar bila kala itu tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di lapangan usaha sektor pertanian begitu rendah, menyerap tenaga kerjapaling banyak namun pertumbuhannya lambat. BPS mencatat persentase penduduk yang bekerja

perlahan perekonomiannya mengalami perubahan dengan pertumbuhan sebesar 5,38 % dari sisi sektoral tumbuh paling tinggi sektor jasa-jasa 12,36 % sektor ini pun memberi andil dalam pembentukan PDRB Gorontalo sebesar 18,02 % dengan motor pertumbuhan adalah jasa swasta. Pada tahun yang sama sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dibandingkan tahun awal berdirinya Gorontalo menjadi 29,73 % dengan laju pertumbuhan 3,89 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, itu artinya produktifitas sektor pertanian meningkat yang dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja di sektor tersebut. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan Rp. 968.046 miliar dengan tingkat pendapatan perkapita relatif meningkat sebesar Rp. 1.075.952.

Sementara itu indikator kesejahteraan lainnya, seperti kemiskinan pada tahun pertama Provinsi Gorontalo cukup tinggi di atas 30 %, secara teoritis penyebab kemiskinan ada dua yaitu; 1) Kemiskinan kultural, diakibatkan karena adanya faktor-faktor adat atau budaya disuatu daerah yang membelenggu sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya ia tetap miskin bahkan turun temurun, 2) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang muncul sebagai akibat ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap tatanan sosial (kebijakan) yang tidak adil. Kemiskinan yang tinggi di Gorontalo khususnya di dua daerah otonom saat itu tidak dapat dinafikkan dampak dari kebijakan pembangunan yang kurang berpihak ke Gorontalo pada saat masih bergabung dengan Sulawesi Utara yang lebih mengorientasikan pembangunan di sekitar Manado-Bitung, meskipun tidak dapat dikesampingkan faktor kemiskinan kultural juga turut andil memperbesar angka kemiskinan. Sebagai daerah agraris, sektor pertanian menjadi tumpuan ekonomi dan



Oleh  
Muh. Amier Arham\*

ketimpangan distribusi pendapatan cenderung merata, terkonfirmasi gini rasio Gorontalo saat itu hanya 0,25 jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Sementara kemampuan fiskal tentu saja masih terbatas, total pendapatan baru mencapai Rp. 77.696 miliar yang berasal dari PAD sangat kecil hanya Rp. 7.762 miliar.

Untuk indikator sosial, pada tahun 2001 tingkat IPM Gorontalo sekitar 64 jauh di bawah Sulawesi Utara yang telah mencapai di atas 70. Ada tiga pilar penopang IPM, yakni kemampuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, jika merujuk pada dimensi pendidikan terlihat dengan jelas bahwa rata-rata penduduk Gorontalo saat itu di atas 73,92 % hanya menamatkan atau tidak tamat Sekolah Dasar dengan rincian 275.101 orang yang tak memiliki ijazah dan 216.966 orang yang hanya menamatkan SD dari total penduduk sebanyak 665.613 jiwa.

Setelah lima tahun berdiri sendiri lepas dari Sulawesi Utara, nilai PDRB Gorontalo meningkat menjadi Rp. 2.025,321 miliar dengan tingkat pendapatan perkapita Rp. 2.226.474, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,06 %, sektor pertanian menjadi kontributor utama 30,48 % dengan laju pertumbuhan 7,31 % dan sektor jasa-jasa juga turut memberikan andil dalam pembentukan PDRB sebesar 16,93 % yang diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 13,77 %. Meningkatnya share sektor perdagangan dan kegiatan pertanian mendorong sektor keuangan tumbuh pesat

jagung melonjak tajam dari sekitar 100.000 ton naik menjadi 400.045,99 ton di tahun 2005 dengan luas panen 107.752 ha.

Meningkatnya pendapatan perkapita dan berkembangnya sektor pertanian memberikan dampak terhadap menurunnya angka kemiskinan menjadi 29,05 %, sejalan dengan itu distribusi pendapatan (gini rasio) juga mengalami penurunan 2,48 dan secara perlahan IPM Gorontalo naik 69,57 poin. Meningkatnya kinerja perekonomian Gorontalo selain didongkrak oleh produksi pertanian, APBD turut menunjang dari sisi pengeluaran. Tercatat bahwa total pendapatan Provinsi Gorontalo di tahun 2005 naik signifikan menjadi Rp. 270,259.72 miliar, diperoleh dari PAD sebesar Rp. 46,173 miliar kenaikannya sangat besar dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Memasuki satu dekade Provinsi Gorontalo kinerja pertumbuhannya makin mengesankan karena tumbuh di atas 7 % lebih tinggi dibandingkan nasional dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 2.917,491 miliar, yang tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian disusul sektor jasa-jasa, tingkat pendapatan perkapita mencapai Rp. 2.804.838. Hanya saja kenaikan berbagai indikator makro ekonomi pada tahun tersebut memperlihatkan mulai munculnya anomali, yakni gini rasio mengalami kenaikan, jika tahun-tahun sebelumnya rata-rata 0,2 melonjak 0,4 poin. Kenaikan potensi sumber daya ekonomi di Gorontalo mencerminkan mulai terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok masyarakat tertentu. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan kemiskinan, di tahun 2010 persentase kemiskinan terbilang paling rendah sepanjang berdirinya Provinsi Gorontalo yaitu 16,55 %, namun setelahnya meningkat lagi di atas 18 %. Kenaikan angka kemiskinan sejatinya tidak terjadi selain karena pertumbuhan ekonomi tinggi,

6.795.200 miliar, hanya saja tingkat pertumbuhan mulai mengalami kontraksi sejak tahun 2015 sebesar 6,22 % dan pada triwulan 2 tahun 2018 sebesar 5,24 %. Sekalipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, akan tetapi angka kemiskinan turut mengalami penurunan pada bulan Maret 2018 menjadi 16,18 %, sekalipun menurun angka itu masih menempatkan Gorontalo sebagai provinsi termiskin kelima secara nasional. Pada kenyataannya pula gini rasio tidak terjadi perbaikan yang berarti, tetap bertengger di angka 0,40 poin.

Di usia 18 tahun ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo, yaitu; 1) Angka kemiskinan masih di atas double digit dengan tingkat penurunan yang makin melambat, sekalipun pendapatan perkapita secara umum naik, serta APBD sebesar Rp. 1.815 triliun, itu artinya efektifitas belanja pemerintah kurang kuat menurunkan angka kemiskinan, 2) Gini rasio tetap tinggi mencerminkan menumpuknya sumber daya ekonomi pada golongan tertentu saja, gini rasio yang tinggi akan menyulitkan perbaikan angka kemiskinan, sebab menurut Bourguignon (2004) pertumbuhan tidak lagi efektif menurunkan angka kemiskinan jika distribusi pendapatan masih bermasalah, 3) Sekalipun angka pengangguran terbilang rendah akan tetapi tingginya jumlah pekerja yang tergolong setengah pengangguran, hampir 65% dari total angkatan kerja di Gorontalo. Patut diduga bahwa kelompok ini berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di Gorontalo, 4) IPM 67,01 jauh dibawah rata-rata nasional 70,81, dan IPM ditingkat kabupaten/kota perbandingannya sangat ekstrim, dan 5) Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah, yaitu 7,28 tahun dibawah rata-rata nasional 8,10 tahun, akibatnya angkatan kerja di Gorontalo masih didominasi bekerja di sektor kurang produktif. Semoga lima tantangan ini mendapatkan perhatian serius oleh

# "Kaleidoskop" Perekonomian Gorontalo

**T**ANGGAL 5 Desember 2018 hari ini Provinsi Gorontalo telah memasuki usia yang ke 18, pada awal berpisah dari Sulawesi Utara banyak tantangan yang dihadapi oleh daerah ini. Jika dipetakan tantangan pembangunan Provinsi Gorontalo ada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Keduanya saling terkait dan menunjang satu sama lain untuk memajukan percepatan pembangunan. Aspek ekonomi secara makro sederhananya dapat dibaca terkait masalah PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, serta kemampuan fiskal. Sedangkan dilihat dari aspek sosialnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

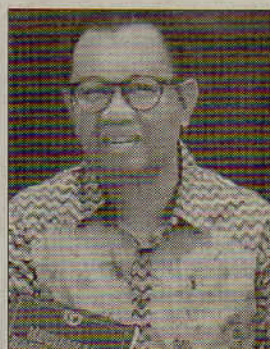
Pada tahun 2000 tonggak awal berdirinya Gorontalo tercatat PDRB atas harga konstan baru mencapai Rp. 918.614 miliar, dengan tingkat pendapatan per kapita Rp. 1.060.985 dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89 %. Sektor pertanian menjadi motor penggerak perekonomian, sektor ini berkontribusi sebesar 30,16 % dan sektor jasa-jasa 16,90 % yang didominasi oleh jasa pemerintah. Distribusi perekonomian semacam ini menggambarkan bahwa aktor utama ekonomi Gorontalo adalah rumah tangga petani dan pemerintah, sementara peran swasta apalagi internasional masih sangat lemah. Patut disayangkan, sektor pertanian sekalipun memiliki pangsa yang paling besar namun laju pertumbuhannya terhitung rendah, yaitu 3,37 % kalah jauh dari sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 14,01 % dengan tingkat pangsa yang sangat kecil 0,67 %. Sehingga wajar bila kala itu tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di lapangan usaha sektor pertanian begitu rendah, menyerap tenaga kerjapaling banyak namun pertumbuhannya lambat. BPS mencatat persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ada 56 % bekerja di sektor pertanian dan 11 % bekerja di sektor jasa-jasa.

Pada tahun 2001 setelah ada pemerintahan terbentuk dilingkungan Provinsi Gorontalo,

perlahan perekonomiannya mengalami perubahan dengan pertumbuhan sebesar 5,38 % dari sisi sektoral tumbuh paling tinggi sektor jasa-jasa 12,36 % sektor ini pun memberi andil dalam pembentukan PDRB Gorontalo sebesar 18,02 % dengan motor pertumbuhan adalah jasa swasta. Pada tahun yang sama sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dibanding tahun awal berdirinya Gorontalo menjadi 29,73 % dengan laju pertumbuhan 3,89 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, itu artinya produktifitas sektor pertanian meningkat yang dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja di sektor tersebut. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan Rp. 968.046 miliar dengan tingkat pendapatan perkapita relatif meningkat sebesar Rp. 1.075.952.

Sementara itu indikator kesejahteraan lainnya, seperti kemiskinan pada tahun pertama Provinsi Gorontalo cukup tinggi di atas 30 %, secara teoritis penyebab kemiskinan ada dua yaitu; 1) Kemiskinan kultural, diakibatkan karena adanya faktor-faktor adat atau budaya disuatu daerah yang membelenggu sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya ia tetap miskin bahkan turun temurun, 2) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang muncul sebagai akibat ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap tatanan sosial (kebijakan) yang tidak adil. Kemiskinan yang tinggi di Gorontalo khususnya di dua daerah otonom saat itu tidak dapat dinafikkan dampak dari kebijakan pembangunan yang kurang berpihak ke Gorontalo pada saat masih bergabung dengan Sulawesi Utara yang lebih mengorientasikan pembangunan di sekitar Manado-Bitung, meskipun tidak dapat dikesampingkan faktor kemiskinan kultural juga turut andil memperbesar angka kemiskinan.

Sebagai daerah agraris, sektor pertanian menjadi tumpuan ekonomi dan secara umum angka kemiskinan cenderung tinggi karena rendahnya nilai tambah produk pertanian, produktifitas tenaga kerja relatif rendah serta lemahnya perubahan struktur ekonomi. Berbeda halnya dengan



Oleh  
Muh. Amier Arham\*

ketimpangan distribusi pendapatan cenderung merata, terkonfirmasi gini rasio Gorontalo saat itu hanya 0,25 jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Sementara kemampuan fiskal tentu saja masih terbatas, total pendapatan baru mencapai Rp. 77.696 miliar yang berasal dari PAD sangat kecil hanya Rp. 7.762 miliar.

Untuk indikator sosial, pada tahun 2001 tingkat IPM Gorontalo sekitar 64 jauh di bawah Sulawesi Utara yang telah mencapai di atas 70. Ada tiga pilar penopang IPM, yakni kemampuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, jika merujuk pada dimensi pendidikan terlihat dengan jelas bahwa rata-rata penduduk Gorontalo saat itu di atas 73,92 % hanya menamatkan atau tidak tamat Sekolah Dasar dengan rincian 275.101 orang yang tak memiliki ijazah dan 216.966 orang yang hanya menamatkan SD dari total penduduk sebanyak 665.613 jiwa.

Setelah lima tahun berdiri sendiri lepas dari Sulawesi Utara, nilai PDRB Gorontalo meningkat menjadi Rp. 2.025.321 miliar dengan tingkat pendapatan perkapita Rp. 2.226.474, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,06 %, sektor pertanian menjadi kontributor utama 30,48 % dengan laju pertumbuhan 7,31 % dan sektor jasa-jasa juga turut memberikan andil dalam pembentukan PDRB sebesar 16,93 % yang diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 13,77 %. Meningkatnya share sektor perdagangan dan kegiatan pertanian mendorong sektor keuangan tumbuh pesat 16,37 %. Asumsinya kinerja pertanian terus akseleratif dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja di sektor pertanian mendorong permintaan uang (money demand) meningkat pula. Apalagi saat itu produksi

jagung melonjak tajam dari sekitar 100.000 ton naik menjadi 400.045,99 ton di tahun 2005 dengan luas panen 107.752 ha.

Meningkatnya pendapatan perkapita dan berkembangnya sektor pertanian memberikan dampak terhadap menurunnya angka kemiskinan menjadi 29,05 %, sejalan dengan itu distribusi pendapatan (gini rasio) juga mengalami penurunan 2,48 dan secara perlahan IPM Gorontalo naik 69,57 poin. Meningkatnya kinerja perekonomian Gorontalo selain didongkrak oleh produksi pertanian, APBD turut menunjang dari sisi pengeluaran. Tercatat bahwa total pendapatan Provinsi Gorontalo di tahun 2005 naik signifikan menjadi Rp. 270.259.72 miliar, diperoleh dari PAD sebesar Rp. 46.173 miliar kenaikannya sangat besar dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Memasuki satu dekade Provinsi Gorontalo kinerja pertumbuhan ekonominya makin mengesankan karena tumbuh di atas 7 % lebih tinggi dibandingkan nasional dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 2.917.491 miliar, yang tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian disusul sektor jasa-jasa, tingkat pendapatan perkapita mencapai Rp. 2.804.838. Hanya saja kenaikan berbagai indikator makro ekonomi pada tahun tersebut memperlihatkan mulai munculnya anomali, yakni gini rasio mengalami kenaikan, jika tahun-tahun sebelumnya rata-rata 0,2 melonjak 0,4 poin. Kenaikan potensi sumber daya ekonomi di Gorontalo mencerminkan mulai terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok masyarakat tertentu. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan kemiskinan, di tahun 2010 persentase kemiskinan terbilang paling rendah sepanjang berdirinya Provinsi Gorontalo yaitu 16,55 %, namun setelahnya meningkat lagi di atas 18 %. Kenaikan angka kemiskinan sejatinya tidak terjadi selain karena pertumbuhan ekonomi tinggi, juga dibarengi dengan makin meningkatnya APBD sebesar Rp. 534.032 miliar naik 100 % lebih, dan yang berasal dari PAD Rp. 103.283 miliar.

Memasuki usia ke 18 tahun, PDRB menurut harga konstan telah mencapai Rp.

6.795.200 miliar, hanya saja tingkat pertumbuhan mulai mengalami kontraksi sejak tahun 2015 sebesar 6,22 % dan pada triwulan 2 tahun 2018 sebesar 5,24 %. Sekalipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, akan tetapi angka kemiskinan turut mengalami penurunan pada bulan Maret 2018 menjadi 16,18 %, sekalipun menurun angka itu masih menempatkan Gorontalo sebagai provinsi termiskin kelima secara nasional. Pada kenyataannya pula gini rasio tidak terjadi perbaikan yang berarti, tetap bertengger di angka 0,40 poin.

Di usia 18 tahun ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo, yaitu; 1) Angka kemiskinan masih di atas double digit dengan tingkat penurunan yang makin melambat, sekalipun pendapatan perkapita secara umum naik, serta APBD sebesar Rp. 1.815 triliun, itu artinya efektifitas belanja pemerintah kurang kuat menurunkan angka kemiskinan, 2) Gini rasio tetap tinggi mencerminkan menumpuknya sumber daya ekonomi pada golongan tertentu saja, gini rasio yang tinggi akan menyulitkan perbaikan angka kemiskinan, sebab menurut Bourguignon (2004) pertumbuhan tidak lagi efektif menurunkan angka kemiskinan jika distribusi pendapatan masih bermasalah, 3) Sekalipun angka pengangguran terbilang rendah akan tetapi tingginya jumlah pekerja yang tergolong setengah pengangguran, hampir 65% dari total angkatan kerja di Gorontalo. Patut diduga bahwa kelompok ini berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di Gorontalo, 4) IPM 67,01 jauh dibawah rata-rata nasional 70,81, dan IPM ditingkat kabupaten/kota perbandingannya sangat ekstrim, dan 5) Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah, yaitu 7,28 tahun dibawah rata-rata nasional 8,10 tahun, akibatnya angkatan kerja di Gorontalo masih didominasi bekerja di sektor kurang produktif. Semoga lima tantangan ini mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah untuk kejayaan Gorontalo. Selamat HUT Gorontalo ke 18. (\*\*\*)

\*) Penulis adalah  
Pengajar Fakultas  
Ekonomi UNG